

STUDI TENTANG KONTRIBUSI PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP BELANJA MODAL DI KABUPATEN KUTAI TIMUR

Resa Suma Priandi Abas¹

Abstrak

Resa Suma Priandi Abas, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah Meningkatkan Terhadap Belanja Modal Di Kabupaten Kutai Timur. dibawah bimbingan Bapak Drs. H. Burhanudin , M.Si dan Ibu Hj. E. Letizia Dyastari S.Sos, M.Si. Untuk mengetahui Kontribusi Pendapatan Asli Daerah Meningkatkan Terhadap Belanja Modal Di Kabupaten Kutai Timur. Jenis Penelitian ini adalah dengan menggunakan penelitian kualitatif yakni, analisis deskripsi. Untuk memperoleh data penelitian, peneliti menggunakan metode dokumentasi data sekunder. Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa kontribusi Pendapatan Asli Daerah mengalami penurunan dan peningkatan, hal ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah relatif kecil dalam memberikan kontribusi terhadap Belanja Modal di Kabupatn Kutai Timur. Walaupun kontribusi Pendapatan Asli Daerah kecil terhadap Belanja Modal akan tetapi cukup berarti dalam pembiayaan pemerintah dan pembangunan daerah.

Kata Kunci : *Kontribusi, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Belanja Modal*

Pendahuluan

Latar Belakang

Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan perundang-undangan. Hal tersebut sesuai dengan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah. Penyerahan berbagai kewenangan dalam rangka desentralisasi ini tentunya harus disertai dengan penyerahan dan pengalihan pembiayaan. Sumber pembiayaan yang paling penting adalah Pendapatan Asli Daerah dimana komponen utamanya adalah penerimaan yang berasal dari pajak dan retribusi daerah. Sebagai administrator penuh, masing-masing daerah harus bertindak efektif dan efisien agar pengelolaan daerahnya lebih terfokus dan mencapai sasaran yang telah ditentukan. Pemerintah daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan, khususnya

¹ Mahasiswa program S1 Ilmu pemerintahan , ilmu sosial dan ilmu politik, universitas Mulawarman. Email: resa_spa@yahoo.com

untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan cermin kemandirian suatu daerah. Penerimaan murni daerah yang merupakan modal utama bagi daerah dalam membiayai pemerintahan dan pembangunan di daerahnya. Dalam menjalankan otonomi daerah di Pemerintahan Kabupaten Kutai Timur dituntut untuk mampu meningkatkan PAD yang merupakan tolak ukur terpenting bagi kemampuan daerah dalam menyelenggarakan dan mewujudkan otonomi daerah.

Konsekuensi di dalam melaksanakan otonomi daerah, pemerintah kota dituntut untuk mampu membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang menjadi kewenangannya. Hal ini menandakan bahwa daerah harus berusaha untuk mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan tolak ukur bagi daerah dalam menyelenggarakan dan mewujudkan otonomi daerah. Pada prinsipnya semakin besar sumbangan PAD terhadap Belanja Daerah (Belanja modal) akan menunjukkan semakin kecil ketergantungan daerah kepada pusat.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mengadakan penelitian tugas akhir dengan judul: "Kontribusi Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal di Kabupaten Kutai Timur"

Kerangka Dasar Teori

Kontribusi

Menurut T. Guritno (1992 : 76), Kontribusi adalah sesuatu yang diberikan bersama-sama dengan pihak lain untuk tujuan biaya, atau kerugian tertentu atau bersama.

Jadi, yang dimaksud dengan kontribusi dalam penelitian ini adalah Sumbangan atau iuran yang diperoleh dari Pendapatan Asli Daerah yang tujuannya digunakan untuk membiayai Belanja Modal di Kabupaten Kutai Timur.

Otonomi Daerah

Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kemudian Halim (2001:5). mengatakan Otonomi daerah pada hakikatnya berkenaan dengan pelimpahan wewenang pengambilan keputusan, kebijakan, pengelolaan dana publik dan pengaturan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat.

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa otonomi daerah ialah kebebasan dan kemandirian satuan pemerintah lebih rendah untuk mengatur sebagian urusan pemerintahan.

Pendapatan Asli Daerah

Menurut Yuwono dkk (2005:107), pendapatan asli daerah adalah semua penerimaan kas yang menjadi hak daerah dan diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Lebih lanjut Halim (2007:96) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah.

Menurut UU Nomor 33 Tahun 2004 pasal 1, pendapatan asli daerah adalah penerimaan diperoleh dari sumber-sumber di dalam daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku .

Jadi pendapatan asli daerah merupakan sumber penerimaan daerah yang digunakan untuk modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan usaha usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat. PAD terbagi atas 4 yakni : pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Belanja Modal

Menurut Permendagri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Belanja Modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.

Hipotesis

Ho: Persentase kontribusi pendapatan asli daerah terhadap belanja modal rendah/ tidak berkontribusi.

Ha: Persentase kontribusi pendapatan asli daerah terhadap belanja modal tinggi.

Definisi Konsepsional

Kontribusi Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal di Kabupaten Kutai Timur adalah sumbangan atau iuran yang diperoleh dari sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kutai Timur dalam

setiap tahun anggaran yang digunakan untuk membiayai pengeluaran Belanja Modal Kabupaten Kutai Timur.

Definisi Operasional

Indikator-indikator yang di gunakan atau gejala yang dihadapi dalam mengukur variable-variabel, diantaranya sebagai berikut:

1. Indikator dari variabel Pendapatan Asli Daerah.
 - a. Pajak Daerah.
 - b. Retribusi Daerah.
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan.
 - d. Lain-lain PAQD yang sah.
2. Indikator untuk mengukur variabel Belanja Modal adalah besarnya jumlah belanja modal yang ditetapkan setiap tahunnya.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Sesuai dengan judul dari penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Metode penelitian deskriptif adalah suatu metode penelitian yang menggambarkan keadaan yang sebenarnya pada saat berlangsungnya penelitian melalui pengumpulan data yang kemudian diinterpretasikan satu sama lain sehingga diperoleh perumusan dan analisa terhadap masalah yang ada.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa metode penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penuangan pikiran yang memaparkan, menggambarkan dan melaporkan suatu keadaan atau objek dari apa yang diteliti berdasarkan fakta-fakta dan keterangan yang diperoleh.

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Kutai Timur propinsi Kalimantan Timur. Pemilihan Kabupaten Kutai Timur sebagai daerah penelitian dikarenakan untuk memudahkan pengumpulan data.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam suatu penelitian diperlukan teknik pengumpulan data untuk mendapatkan data-data yang akurat, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Dokumentasi
Dokumentasi adalah ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan dengan penelitian (J. Supranto, 1999). Dokumentasi dilakukan dengan

mengadakan penelaah dan pencatatan dokumen-dokumen tertulis perusahaan atau instansi. Dokumen yang dimaksud disini adalah dokumen yang ada di Badan Pusat Statistik (BPS) tentang Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2009-2012.

2. Studi Pustaka

Studi Pustaka adalah metode-metode pengumpulan data dengan cara membaca literature, arsip dan buku-buku (J. Supranto, 1999:47).

Teknik Analisis Data

Untuk mengukur variabel yang akan diteliti, dalam penelitian ini akan digunakan sejumlah parameter, yaitu:

1. Perhitungan kontribusi PAD

$$Share = \frac{PAD}{Belanja\ Modal} \times 100\%$$

Keterangan:

Share = Kontribusi

PAD = Pendapatan Asli Daerah

Belanja Modal = Belanja Modal

2. Perhitungan pertumbuhan PAD

$$Growth = \frac{PAD_i - PAD_{i-1}}{PAD_{i-1}} \times 100\%$$

Keterangan:

Growth = Pertumbuhan

PAD_i = Pendapatan Asli Daerah periode *i*

PAD_{i-1} = Pendapatan Asli Daerah periode *i-1*

Hasil Penelitian

penulis akan menyajikan data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan melalui observasi, wawancara dan penelitian dokumen berupa data-data laporan dan arsip yang berhubungan dengan penelitian.

Keadaan Geografis

Kabupaten Kutai Timur merupakan Kabupaten di Kalimantan Timur dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Kutai Kertanegara. Luas wilayah Kabupaten Kutai Timur adalah 35.747,50 km² atau 17% dari total

luas Provinsi Kalimantan Timur, terletak antara 118°58'19" Bujur Timur dan 115°56'26" Bujur Barat dan 01°52'39" Lintang Utara dan 00°02'10" Lintang Selatan.

Kabupaten Kutai Timur merupakan kabupaten baru hasil dari pemekaran dari Kabupaten Kutai berdasarkan Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999, tentang Pemekaran Wilayah Provinsi dan Kabupaten yang diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri pada Tanggal 28 Oktober 1999.

Secara administrative, Kabupaten Kutai Timur memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Talisayan dan Kecamatan Kelay Kabupaten Berau.
- Sebelah Timur berbatasan dengan selat Makassar dan laut Sulawesi.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Kutai Kertanegara.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Kutai Kertanegara.

Gambaran Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Kutai Timur

Gambaran mengenai jumlah realisasi Pendapatan Asli Daerah yang berhasil diperoleh, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2008-2011 dapat dilihat pada table 4.3 sebagai berikut :

Tabel 1
Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kutai Timur
Tahun Anggaran 2009-2012
(Dalam Rupiah)

Jenis Penerimaan	Tahun Anggaran			
	2009	2010	2011	2012
Retribusi	9.490.554.858,15	7,644,419,829,99	6,454,706,227,74	8.640.080.843,00
Pajak Daerah	7.679.497.861,04	4,772,008,197,00	22,904,548,111,25	26.395.611.324,60
Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan	4.612.275.602,31	28,147,906,144,91	3,151,317,483,96	2.919.390.893,65

Kontribusi Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal (Resa S.P. Abas)

Lain-lain PAD yang sah	49.481.528.20 5,11	22,434,382,82 1.18	20,677,798,70 3.37	27.924.020.97 4,78
Total	71.263.856.52 6,81	62,998,716,99 3.08	53,188,370,52 6.32	65.879.104.02 6,03

Sumber : BPS Kabupaten Kutai Timur (diolah)

Dari tabel 4.2 dapat dilihat bahwa data realisasi PAD tertinggi terjadi pada tahun anggaran 2009 dengan jumlah realisasi sebesar Rp. 71.263.856.526,81 sedangkan yang terendah terjadi pada tahun 2011 dengan jumlah realisasi sebesar Rp. 53.188.370.526,32.

Realisasi PAD pemerintah Kabupaten Kutai Timur selama tahun anggaran 2008-2009 mengalami kenaikan, sedangkan penurunan terjadi di tahun anggaran 2010-2011. Hal ini mengindikasikan bahwa kurangnya upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur dalam menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah diantaranya dengan intensifikasi dan ekstensifikasi disektor pajak, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, sumber keuangan yang berasal dari pendapatan asli daerah lebih penting dibandingkan dengan sumber-sumber diluar pendapatan asli daerah, karena pendapatan asli daerah dapat dipergunakan sesuai dengan prakarsa dan inisiatif daerah sedangkan bentuk pemberian pemerintah (non PAD) sifatnya lebih terikat. Dengan penggalian dan peningkatan pendapatan asli daerah diharapkan pemerintah daerah juga mampu meningkatkan kemampuannya dalam penyelenggaraan urusan pemerintah.

Data mengenai kontribusi PAD terhadap Total Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur dapat dilihat pada Tabel 4.3

Tabel 2
Kontribusi PAD Terhadap Total Pendapatan Daerah
Tahun Anggaran 2009-2012
(Dalam Rupiah)

Tahun	PAD (Rp)	Total Pendaptan (Rp)	Kontribusi (%)
2009	71.263.856.526,81	1,687,016,621,143.69	4,2
2010	62.998.716.993,08	1,693,534,546,017.31	3,7
2011	53.188.370.526,32	2,291,911,921,471,32	2,3

2012	65.879.104.026,03	2.654.346.719.185,03	2,5
Rata-rata			3,175

Sumber : BPS Kabupaten Kutai Timur (diolah)

Dari Tabel 2 dapat dilihat bahwa kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah mengalami penurunan selama tahun anggaran 2009-2011 dan mengalami peningkatan pada tahun 2012. Persentasi kontribusi tertinggi terjadi pada tahun anggaran 2009 yaitu 4.2 % dengan jumlah realisasi sebesar Rp. 71.263.856.526,81. Sedangkan persentasi terendah terjadi pada tahun anggaran 2011 yaitu 2.3 % dengan jumlah realisasi sebesar Rp. 53.188.370.526,32 .

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Kutai Timur tahun anggaran 2009, jumlah PAD yang berhasil diperoleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur adalah sebesar Rp. 71.263.856.526,81. Dari Jumlah tersebut pendapatan yang berasal dari pajak sebesar Rp. 7.679.497.861,04 , retribusi daerah sebesar Rp. 9.490.554.858,15, Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp. 4.612.275.602,31 dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebesar Rp. 49.481.528.205,11.

Pada tahun anggaran 2010, jumlah PAD yang berhasil diperoleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur adalah sebesar Rp. 62.998.716.993,08. Dari Jumlah tersebut pendapatan yang berasal dari pajak sebesar Rp. 4.772.008.197,00 , retribusi daerah sebesar Rp. 7.644.419.829,99 , hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp. 28.147.906.144,91 dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebesar Rp. 22.434.382.821,18.

Pada tahun anggaran 2011, jumlah PAD yang berhasil diperoleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur adalah sebesar Rp. 53.188.370.526,32. Dari Jumlah tersebut pendapatan yang berasal dari pajak sebesar Rp. 22.904.548.111,25 , retribusi daerah sebesar Rp. 6.454.706.227,74 , hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp. 3.151.317.483,96 dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebesar Rp. 20.677.798.703,37.

Pada tahun anggaran 2012, jumlah PAD yang berhasil diperoleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur adalah sebesar Rp. 65.879.104.026,03. Dari Jumlah tersebut pendapatan yang berasal dari pajak sebesar Rp. 26.395.611.324,60 , retribusi daerah sebesar Rp. 8.640.080.843,00 , hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp. 2.919.390.893,65 dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebesar Rp. 27.924.020.974,78.

Dalam struktur Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur selama tahun anggaran 2009-2012, dapat dilihat kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap jumlah Pendapatan Daerah masih sangat kecil yaitu dengan rata-rata 3,175%. Hal ini mencerminkan ketergantungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur terhadap pemerintah pusat masih tinggi. Mengingat kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah yang masih kecil dapat dikatakan kemampuan keuangan Kabupaten Kutai Timur masih kurang dimana kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan masih banyak dibiayai dari dana Transfer.

Pendapatan asli daerah merupakan tulang punggung pembiayaan daerah, oleh karenanya kemampuan melaksanakan ekonomi diukur dari besarnya kontribusi yang diberikan oleh pendapatan asli daerah terhadap Total APBD, semakin besar kontribusi yang dapat diberikan oleh pendapatan asli daerah berarti semakin kecil ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan pemerintah pusat sehingga otonomi daerah dapat terwujud.

Gambaran Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Kutai Timur

Gambaran mengenai jumlah realisasi belanja modal Pemerintah Kabupaten Kutai Timur tahun anggaran 2009-2012 dapat dilihat pada tabel 4.4 berikut ini :

Tabel 3
Belanja Modal Kabupaten Kutai Timur
Tahun Anggaran 2009-2012
(Dalam Rupiah)

Tahun	Belanja Modal (Rp)	Belanja Daerah (Rp)	Kontribusi (%)
2009	677.632.244.158,22	1,797,182,985,683.18	37.7
2010	821.412.717.333,39	2,142,057,403,142.89	38.3
2011	755.981.516.474,10	2,157,331,954,224.10	35
2012	1.159.301.426.519,00	2.593.055.033.956,00	44.7
Rata-rata			39

Sumber : BPS Kabupaten Kutai Timur (diolah)

Berdasarkan tabel 4.4 data belanja modal Pemerintah Kabupaten Kutai Timur selama tahun anggaran 2009-2012 mengalami kenaikan dan

penurunan begitupun menurut gambar 4.3 kontribusi belanja modal terhadap Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Kutai Timur selama tahun anggaran 2009-2012 mengalami kenaikan dan penurunan. Persentase tertinggi terjadi pada tahun anggaran 2012, yaitu 44,7% dengan jumlah belanja modal sebesar Rp. 1.159.301.426.519,00 dan persentase kontribusi belanja modal terendah terjadi pada tahun 2011 dengan persentase sebesar 35% dengan belanja modal sebesar Rp. 755.981.516.474,10

Pada tahun 2009, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur hanya sedikit mengalokasikan dananya untuk pembangunan daerah dalam bentuk investasi. Sebab, kecilnya alokasi untuk belanja modal yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, jumlah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur sebesar Rp. 677.632.244.158,22.

Pada tahun anggaran 2010-2012, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur mulai menaikkan kembali alokasi untuk belanja modalnya. Hal ini merupakan tindakan yang sangat tepat, meningkatnya pembanguna daerah maka akan meningkat juga perekonomian masyarakat sehingga kesejahteraan masyarakat juga ikut meningkat.

Dilihat dari rata-rata persentase belanja modal tahun anggaran 2008-2012 yaitu sebesar 39% hal ini menunjukkan tingginya alokasi belanja modal yang di keluarkan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur. Untuk itu, kedepannya Pemerintah Kabupaten Kutai Timur diharapkan dalam penggunaan belanja modal harus dilakukan seefektif mungkin dengan memperhatikan prioritas pembangunan daerah. Mengingat belanja modal ini merupakan pengeluaran penting dalam melaksanakan pembangunan daerah dan manfaatnya dapat dirasakan selama beberapa tahun kedepan.

Pembahasan

Kontribusi Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal

Sumber keuangan daerah untuk penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah adalah Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang harus digali dan ditingkatkan secara terus menerus oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dalam mengurus rumah tangganya dan juga untuk meningkatkan pembangunan di berbagai sector. Untuk meningkatkan penerimaan dari PAD, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur harus berupaya untuk meningkatkan PAD dengan cara:

Kontribusi Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal (Resa S.P. Abas)

1. Program Intensifikasi, yaitu tindakan memperbaiki penerimaan pendapatan dengan cara melakukan pemungutan yang lebih giat secara ketat dan teliti.
2. Program Ekstensifikasi, yaitu mencari dan menggali sumber-sumber PAD yang baru dalam batas ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang diperkirakan akan memiliki potensi untuk digali.

Berikut ini pembahasan yang lebih jelas mengenai besar kecilnya kemampuan daerah Kabupaten Kutai Timur dalam Belanja modal untuk menunjang roda pemerintahan, dapat dilihat dari kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal Kabupaten Kutai Timur pada Tabel 4.7 :

Tabel 4
Kontribusi PAD Terhadap Belanja Modal
Tahun Anggaran 2009-2012
(Dalam Rupiah)

No	Tahun Anggaran	PAD	Belanja Modal	Kontribusi
1	2009	71.263.856.526,81	677.632.244.158,22	10,5 %
2	2010	62.998.716.993,08	821.412.717.33,39	7,7 %
3	2011	53.188.370.526,32	755.981.516.474,10	7%
4	2012	65.879.104.026,03	1.159.301.426.519	5,7%
Rata-rata				7,72%

Berdasarkan Tabel 4 dapat kita lihat kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap besarnya Belanja Modal masih sangat rendah dengan persentase yang terus menurun dari tahun 2009-2012. Pada tahun anggaran 2009 sebesar 10,5% dengan PAD sebesar Rp. 71.263.856.526,81 dan Belanja Modal sebesar Rp. 677.632.244.158,22 ,kemudian pada tahun anggaran 2010 dengan persentase sebesar 7,7% dengan PAD sebesar Rp. 62.998.716.993,08

dan Belanja Modal sebesar Rp. 821.412.717.333,39 ,kemudian pada tahun anggaran 2011 sebesar 7% dengan PAD sebesar Rp. 53.188.370.526,32 dan Belanja Modal sebesar Rp. 755.981.516.474,10 dan kemudian pada tahun anggaran 2012 sebesar 5,7% dengan PAD sebesar Rp. 65.879.104.026,03 dan Belanja Modal sebesar Rp. 1.159.301.426.519,00 .

Dengan persentase rata-rata sebesar 7,72% atau dengan kata lain belum mampu mencukupi atau menutupi pengeluaran Belanja Modal yang tujuannya adalah Pembanguna Daerah. Hal ini dikarenakan kurangnya usaha dalam melakukan penggalan dan pencarian sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah baru yang menarik investasi dai luar daerah, serta kurangnya keketatan dan ketelitian dalam melakukan pemungutan untuk Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang sah sebagai sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah. Guna menutupi ketidak mampuan Pendapatan Asli Daerah dalam menutupi besarnya Belanja Modal, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur masih mendapatkan bantuan dari Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat. Dengan Demikian, hipotesis yang dikemukakan oleh penulis bahwa **“Pendapatan Asli Daerah Berkontri”**, tidak dapat diterima.

Penutup

Kesimpulan

Pada bagian ini peneliti akan memaparkan dan menjelaskan kesimpulan berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dibuat peneliti baik secara observasi, wawancara dan dokumentasi atau melalui dekomen-dokumen yang memperkuat proses penyimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada Bab IV serta mengacu pada beberapa teori maka penulis mengambil kesimpulan penelitian sebagai berikut :

1. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal di Kabupaten Kutai Timur sebagai berikut :
 - a. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap besarnya Belanja Modal masih sangat rendah dengan persentase yang terus menurun dari tahun 2009-2012. Pada tahun anggaran 2009 sebesar 10,5% dengan PAD sebesar Rp. 71.263.856.526,81 dan Belanja Modal sebesar Rp. 677.632.244.158,22 ,kemudian pada tahun anggaran 2010 dengan persentase sebesar 7,7% dengan PAD sebesar Rp. 62.998.716.993,08 dan Belanja Modal sebesar Rp. 821.412.717.333,39 ,kemudian pada tahun anggaran 2011 sebesar 7% dengan PAD sebesar Rp. 53.188.370.526,32 dan Belanja Modal sebesar Rp. 755.981.516.474,10 dan kemudian pada tahun anggaran 2012 sebesar 5,7% dengan PAD sebesar Rp. 65.879.104.026,03 dan Belanja Modal sebesar Rp. 1.159.301.426.519,00 .
 - b. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal masih sangat rendah dengan persentase rata-rata sebesar 7,72% dalam empat tahun anggaran, hal ini disebabkan kurangnya usaha yang dilakukan pemerintah dalam menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah, disamping itu Pemerintah Kabupaten Kutai Timur juga kurang ketat dan teliti dalam melakukan pemungutan untuk Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD yang sah. Untuk itu perlu ditingkatkan lagi melalui usaha intensifikasi dan ekstensifikasi guna memenuhi tujuan yang telah ditetapkan melalui usaha intensifikasi dan ekstensifikasi.
2. Implementasi pengaturan pemerintah daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah tahun 2009-2012 sudah sesuai dengan amanat Undang-undang No.12 Tahun 2008 Perubahan kedua atas Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Pemerintah Daerah dan kemudian Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Kemudian dalam pelaksanaannya dilapangan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur sudah menjalankan asas-asas umum pemerintahan yang layak sesuai dengan

amanat Undang-undang No. 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik, dan Undang-undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Saran

Adapun saran-saran yang penulis dapat berikan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Baik pemerintah pusat dan provinsi hendaknya lebih memberikan kewenangan terhadap pemerintah daerah dalam mengurus rumah tangganya. Dalam menggali sumber potensi penerimaan daerah lebih memberikan kewenangan yang lebih besar dan leluasa untuk mengelolanya dengan memperhatikan kondisi dan potensi yang ada pada Kabupaten Kutai Timur. Sehingga pemerintah Kabupaten Kutai Timur dapat mengoptimalkan upayanya dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan terus melakukan pencarian sumber potensi pendapatan daerah.
2. Pemerintah Daerah Kutai Timur hendaknya mengoptimalkan upayanya dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, baik berdasarkan program intensifikasi maupun program ekstensifikasi, dengan jalan :
 - a. Meningkatkan mutu yang berhubungan dengan sumber daya manusia yang berhubungan dengan Pendapatan Asli Daerah.
 - b. Memperluas dan mengembangkan aktivitas ekonomi yang menunjang pengembangan lembaga ekonomi.
 - c. Memperluas kesempatan kerja terutama di pedesaan.
 - d. Terus melakukan pencapaian dan penggalian sumber pendapatan baru khususnya pengembangan dari urusan-urusan rumah tangga yang sudah ada.
3. Untuk meningkatkan pendapatan daerah PAD khususnya, pemerintah Kabupaten Kutai Timur sebaiknya melaksanakan pembaharuan dan penyempurnaan beberapa peraturan daerah yang mengatur pendapatan daerah khususnya PAD yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat, mengingat pendapatan daerah merupakan sumber pendapatan yang dapat diandalkan, serta peningkatan usaha pemungutan secara insentif aktif.
4. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur diharapkan dapat mengalokasikan belanja modalnya pada program/kegiatan yang dapat meningkatkan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat serta dapat merangsang terciptanya sumber pendapatan baru.

5. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan untuk melakukan penelitian lanjutan dengan menambahkan sampel yang digunakan dan memperluas periode pengamatan.
6. Penggunaan data yang lebih lengkap dan rentang periode waktu penelitian yang lebih panjang sehingga lebih mampu untuk dapat dilakukan generalisasi atas hasil penelitian tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Yani. (2002). *Hubungan Keuangan antara Pusat dan Daerah di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Arikunto, Suharsimi, 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Darise, Nurlan. 2008. *Akuntansi Keuangan Daerah*. PT. Indeks : Jakarta
- Erly Suandi, *Hukum Pajak*, Salemba Empat, Jakarta, 2000.
- H.A.W. Widjaja, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonomi*; Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Husaini, Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, 2003. *Metodologi Penelitian Sosial*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Kurniawan, Fitri Lukiastruti dan Muliawan Hamdani, 2008. *Manajemen Strategik Dalam Organisasi*, Media Pressindo, Yogyakarta.
- Mahardika, Timur, 2006. *Strategi Membuka Jalan Perubahan*, Pondok Edukasi, Bantul.
- Makmur, 2009. *Teori Manajemen Strategik Dalam Pemerintahan Dan Pembangunan*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Mangkuprawira, Tb, Sjafrri, 2004. *Manajemen Sumber Daya Manusia Strategik*, Ghalia Indonesia, Jakarta Selatan.
- Mardiasmo. (2006). *Perpajakan*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mardiasmo, Prof., Dr., MBA., Ak. 2009. *Perpajakan Edisi Revisi*. Andi. Yogyakarta
- Moleong, Lexy J, 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosda Karya, Bandung.
- Moleong, Lexy j, 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosda Karya, Bandung.
- Nawawi, Hadari, 2005. *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta : Gajah Mada Uneversity Press.
- Rangkuti, Freddy, 2002. *Analisis Swot Teknik Membedak Kasus Bisnis*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Rudy, May, T, 2002. *Study Strategis Dalam Transformasi Sistem Internasional Pasca Perang Dingin*, Refika Aditama, Bandung.
- Siahaan, Marihot P. 2005. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Subarsono. 2009. *Analisis Kebijakan Publik*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.

- Sugiyono, 2010, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung.
- Sugiyono, 2009. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung.
- Tangkilisan, Hessel Nogi S, 2003. *Manajemen Sumber Daya Manusia Birokrasi Publik*, Lukman Offset dan Yayasan Pembaharuan Administrasi Publik Indonesia, Yogyakarta.
- Tangkilisan, Hessel Nogi S, 2005. *Manajemen Publik*, Grasindo, Jakarta.
- Waluyo (2008), *Akuntansi Pajak*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Wirawan B. Iiyas & Richard Burton, 2007. *Hukum Pajak Edisi 3*, Salemba Empat, Jakarta.

Dokumen-dokumen

- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah* sebagai pengganti dari Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 dan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang *Pemerintah Daerah*.
- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang *Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah*.
- Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang *Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang *Pengelolaan Keuangan Daerah*

Sumber Internet

- <http://www.negarahukum.com/hukum/pendapatan-asli-daerah.html>
- <http://tulisantangkudi.blogspot.com/2012/07/makalah-pajak-dan-retribusidaerah.html>
- <http://www.aryesnovianto.com/2003/02/pengertian-pendapatan-aslidaerah.html>
- <http://www.negarahukum.com/hukum/pendapatan-asli-daerah.html>
- www.djpk.depkeu.go.id diakses tanggal 23/10/2012
- www.kabkutim.go.id diakses tanggal 23/10/2012